

**WORKING PAPER No 2
JUNI 2021**

DUA DASAWARSA DESENTRALISASI FISKAL: IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

**Mohammad Zeqi Yasin
Erlangga Agustino Landiyanto
Hesti Retno Budi Arini**



Dua Dasawarsa Desentralisasi Fiskal: Implikasinya Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia

Penulis:

Mohammad Zeqi Yasin, Erlangga Agustino Landiyanto, Hesti
Retno Budi Arini

Editor:

Mohammad Zeqi Yasin

Layout:

Akiraka Ramadhan

Diterbitkan Oleh:

Research Institute of Socio-Economic Development (RISED)

Jl. Dukuh Pakis 2/51, Kecamatan Dukuh Pakis

Surabaya, Jawa Timur

Indonesia

© 2021

UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini merupakan *Working Paper* kedua Research Institute of Socio-Economic Development (RISED). Banyak pengalaman penting yang dapat dijadikan pembelajaran dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian ini. Oleh karena itu, kami hendak menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mulai dari awal hingga akhir proses penulisan penelitian ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pada pengulas: Rumayya, PhD. selaku penasehat RISED, Tegar Rismanuar Nuryitmawan, S.E. M.Ec. selaku direktur RISED, yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan masukan dan perbaikan yang sangat membangun dalam mempertajam analisis pada studi ini. Tanpa dukungan sumbangan pikiran serta masukan yang membangun dari semua pihak yang disebutkan di atas, studi dan laporan ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik. Terima kasih.

ABSTRAK

Implementasi desentralisasi fiskal dalam dua dasawarsa terakhir menghasilkan berbagai temuan-temuan: positif dan negatif. Beberapa studi mengevaluasi desentralisasi fiskal sebagai suatu sistem ideal agar tujuan pembangunan dapat disesuaikan berdasarkan preferensi masyarakat daerah, sehingga pemerintah akan lebih akurat dalam membedakan permintaan warga atas layanan dibandingkan dengan pemerintah pusat. Namun, studi-studi lain menganggap bahwa desentralisasi fiskal yang dimulai pada tahun 2001 sangat minim persiapan dari daerah-daerah. Implementasi desentralisasi justru dianggap semakin memperlebar ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan potensi korupsi oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk membahas sejauh mana desentralisasi fiskal, sebuah reformasi administrasi, dapat menjadi pendorong pembangunan pada daerah-daerah di Indonesia. Metode tinjauan sistematis (*systematic review*) digunakan pada studi ini untuk mengumpulkan dan menganalisis studi-studi terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap sektor-sektor yang menjadi fokus studi ini antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik. Studi ini menemukan bahwa desentralisasi belum memberikan manfaat optimal bagi sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian dan pelayanan publik.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Indonesia, Pembangunan Daerah

JEL *Classification*: H51, H52, H53, H75.

1. LATAR BELAKANG

Berbagai perdebatan tentang definisi, penjelasan dan praktek pembangunan terus berkembang selama beberapa dekade. Sejak Perang Dunia II hingga akhir tahun 1960-an, pembangunan dipandang sebagai proses industrialisasi dan modernisasi yang berorientasi semata-mata pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknik manajemen yang rasional. Pada akhir 1960-an, arti pembangunan dirumuskan kembali karena kegagalan strategi-strategi sebelumnya untuk memasukkan variabel yang lebih beragam, yang mencakup kapabilitas dan pilihan masyarakat (pembangunan manusia) serta struktur, administrasi, peraturan, kebijakan dan sistem ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pieterse, 2010; Turner & Hulme, 1997).

Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat, tetapi juga oleh manajemen dan administrasi lembaga negara yang buruk. Kegagalan sistem terpusat merupakan salah satu kendala pengelolaan negara. Oleh karena itu, desentralisasi, sebuah strategi neoliberalis untuk pembangunan ekonomi, ditujukan untuk memperbaiki sistem administrasi sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pieterse, 2010; Smoker, 2001; Turner & Hulme, 1997). Analisis pembangunan dalam studi ini berfokus pada pembangunan ekonomi melalui lensa neo-liberalis ini.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu reformasi administrasi desentralisasi yang paling luas di negara-negara berkembang dan dapat didefinisikan sebagai pengalihan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan untuk pengeluaran dan pendapatan pemerintah dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Alm et al., 2001; Schneider, 2003; Smoker, 2001). Dampak pengalihan wewenang pada era desentralisasi telah diteliti oleh berbagai studi dan hasilnya cenderung ambigu. Di satu sisi, desentralisasi fiskal diharapkan menjadi tujuan pembangunan yang dapat disesuaikan berdasarkan preferensi masyarakat daerah (Lewis, 2017; Lewis et al., 2020; Oates, 1972), sehingga pemerintah akan lebih akurat dalam membedakan permintaan warga atas layanan dibandingkan dengan pemerintah pusat, serta untuk mengenakan pajak dan pengeluaran secara lebih efektif berdasarkan pengetahuan tersebut (Lewis, 2017). Namun, di sisi lain, implementasi desen-

-tralisasi justru dianggap semakin memperlebar ketimpangan antarwilayah (Aginta et al., 2021; Mahi, 2016; Nasution, 2017), serta meningkatkan potensi korupsi oleh pemerintahan daerah (Cahyaningsih & Fitradhy, 2019; Kraemer, 1997; Lewis, 2016). Pesimisme ini timbul karena implementasi desentralisasi dilaksanakan tanpa persiapan yang matang seperti kapasitas institusi yang mumpuni dan kemampuan para pejabat di tingkat daerah (Aginta et al., 2021; Brodjonegoro, 2004; Tijaja & Faisal, 2014).

Studi ini bertujuan untuk membahas sejauh mana desentralisasi fiskal, sebuah reformasi administrasi, dapat menjadi pendorong pembangunan pada daerah-daerah di Indonesia. Metode tinjauan sistematis (*systematic review*) digunakan pada studi ini untuk mengumpulkan studi-studi terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan di Indonesia. Penggunaan metode ini penting untuk dilakukan sebagai upaya klasifikasi dampak desentralisasi pada isu-isu berdasarkan sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik. Pada akhirnya, usulan kebijakan yang berbasis sektoral dapat disusun berdasarkan temuan tersebut.

Bagian dua studi ini akan membahas teori dan bukti empiris dari desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap pembangunan. Bagian tiga akan membahas tentang metode ulasan sistematis yang digunakan. Temuan akan dipaparkan pada Bagian empat, diikuti diskusi pada Bagian lima serta kesimpulan dan saran kebijakan pada Bagian enam.

2. KAJIAN LITERATUR

Rondinelli, McCullough, and Johson (1989) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif administratif sebagai pengalihan tanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke mitra penyampai layanan, seperti: unit lapangan dari kementerian atau lembaga pemerintah pusat; unit bawahan atau tingkat pemerintahan; badan atau perusahaan publik semi-otonom; otoritas luas, regional atau fungsional; atau organisasi non-pemerintah, swasta atau sukarela. Di bawah desentralisasi, penyediaan beberapa barang publik diharapkan lebih efisien secara ekonomi ketika sejumlah besar institusi lokal terlibat dalam penyediaan layanan daripada ketika layanan hanya disediakan oleh pemerintah pusat. Tingkat ideal desentralisasi akan bergantung pada bagaimana efisiensi yang diperoleh dari komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat dibandingkan dengan keuntungan dari pemerintah pusat yang lebih berperan dalam penentuan kebijakan (Rondinelli et al., 1989).

Bardhan (2002) menekankan bahwa masalah khusus yang muncul dalam desentralisasi di negara berkembang terutama karena konteks kelembagaan, seperti struktur akuntabilitas lokal, partisipasi, kemauan politik, dominasi oligarki lokal dan kapasitas. Hasil desentralisasi di negara berkembang mungkin berbeda dengan negara maju karena adanya perbedaan kemampuan pemerintah pusat dalam mengaktifkan dan memobilisasi persaingan serta membangun kapasitas melalui kebijakan dan regulasi. Perdebatan besar tentang apakah desentralisasi sesuai untuk negara berkembang telah terjadi. Model desentralisasi dianggap lebih sesuai untuk negara maju daripada negara berkembang karena kelangkaan sumber daya fiskal dan masalah tata kelola di negara berkembang. Modal investasi di negara berkembang cukup langka dan harus dikendalikan oleh pemerintah pusat untuk memaksimalkan pengembalian. Sentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan sumber daya fiskal untuk mencapai tujuan nasional dan distribusi pendapatan yang lebih besar. Dari perspektif tata kelola, terdapat banyak masalah politik dan kepemimpinan lokal di negara berkembang, seperti kapasitas yang terbatas, potensi korupsi dan kurangnya kapasitas untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat lokal ke dalam kebijakan dan -

tindakan. Dari perspektif efisiensi ekonomi, desentralisasi memberikan penyediaan layanan dan barang publik yang kurang efisien terkait dengan manfaat dari skala ekonomi lokal jika dibandingkan dengan skala ekonomi besar dari pemerintah pusat (Cahyaningsih & Fitradhy, 2019; Prud'homme, 1995; Rodriguez-Pose, 2008).

Terdapat lima argumen utama mengapa reformasi desentralisasi dibutuhkan oleh negara berkembang. Pertama adalah kegagalan perencanaan ekonomi terpusat untuk mendorong pembangunan ekonomi di sebagian besar negara berkembang. Kedua, kendala fiskal serius yang dihadapi negara-negara berkembang sebagai akibat dari program penyesuaian struktural dan perubahan situasi ekonomi internasional yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan hutang yang tinggi. Ketiga, meningkatnya tuntutan akan layanan publik yang lebih baik, mendorong pemerintah di negara berkembang untuk meningkatkan sinkronisasi antara penyampaian kebijakan dan kebutuhan warga lokal dan mendekatkan fungsi pemerintah kepada masyarakat untuk memungkinkan umpan balik yang lebih besar dan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal. Keempat, mempromosikan efisiensi dan persaingan selama mobilisasi sumber daya dan penyampaian layanan dan barang publik. Kelima adalah mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar (Rodriguez-Pose, 2008; Smoker, 2001).

Schneider (2003) mengklasifikasikan tiga dimensi inti dari konsep desentralisasi: fiskal, administratif, dan politik. Desentralisasi fiskal mengacu pada seberapa besar pemerintah pusat menyerahkan dampak fiskal kepada entitas pemerintah non-pusat. Desentralisasi administratif mengacu pada seberapa banyak otonomi yang dimiliki entitas pemerintah non-pusat dibandingkan dengan kontrol pusat. Akhirnya, desentralisasi politik mengacu pada sejauh mana pemerintah pusat mengizinkan entitas pemerintah non-pusat untuk menjalankan fungsi politik pemerintahan, seperti perwakilan.

Berdasarkan teori, desentralisasi fiskal akan membantu pemerintah daerah menyesuaikan anggaran dengan preferensi daerah dan menyediakan distribusi layanan publik dan pendapatan daerah yang lebih efisien di tingkat daerah.

Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mungkin dapat mengenakan pajak pada beberapa sektor ekonomi lokal dengan lebih mudah daripada pemerintah pusat, mendukung transfer antar daerah dan kebijakan stabilisasi dan juga mendorong efisiensi ekonomi melalui persaingan antar daerah (Bahl & Johannes, 1994).

Terdapat tiga pilar desentralisasi fiskal menurut Bahl (2008): penugasan belanja, penugasan pendapatan, dan transfer antar pemerintah. Penugasan belanja mendefinisikan tanggung jawab pemberian layanan dari pemerintah daerah serta otonomi yang dimiliki pemerintah dalam membuat keputusan tentang tingkat dan campuran belanja anggaran. Pembagian pendapatan menjamin tingkat akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah daerah dengan memberikan sejumlah kekuatan perpajakan. Transfer antar pemerintah, pilar ketiga, memilah-milah alokasi dana pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah dan cenderung menyamakan disparitas antarwilayah.

Studi yang mengevaluasi dampak desentralisasi di negara berkembang memberikan hasil yang beragam. Perdebatan utama tentang dampak desentralisasi fiskal pada pembangunan berfokus pada bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi. Prud'homme (1995) menjelaskan bahaya desentralisasi, dengan alasan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan disparitas karena daerah tidak miskin akan tumbuh lebih cepat daripada daerah miskin karena dimulai dari basis yang lebih kuat. Keadaan rumah tangga miskin di wilayah tidak miskin juga akan lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga miskin di wilayah miskin. Menurut Prud'homme (1995), desentralisasi akan membahayakan stabilitas karena inkonsistensi antara kebijakan nasional dan sub-nasional (daerah). Desentralisasi juga dapat merusak efisiensi ketika membawa proses politik dan birokrasi dari tingkat nasional ke sub-nasional (regional) dan membuat kebijakan publik dan proses administrasi di tingkat sub-nasional menjadi lebih rumit.

Berdasarkan pengamatan empiris di Cina, Zhang and Zou (1998) menemukan hubungan negatif yang signifikan dan kuat secara konsisten antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi provinsi di Cina. Hasil

ini menunjukkan bahwa bahaya desentralisasi yang dikemukakan oleh Prud'homme tampaknya relevan secara empiris. Di sisi lain, argumen Sewell (1996) tentang dampak positif desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh Akai and Sakata (2002), yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal di negara maju dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun temuan Akai and Sakata (2002) memberikan bukti tentang kontribusi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, temuan tersebut tidak menunjukkan bagaimana desentralisasi fiskal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan tinjauan sistematis (*systematic review*) terhadap studi tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian Dwicaksono and Fox (2018) yang melakukan tinjauan sistematis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja dan hasil sistem kesehatan. Studi ini membedakan dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan sektoral regional atau daerah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik.

Studi ini menggunakan beberapa *database* untuk mencari artikel yang diterbitkan pada periode pasca desentralisasi (setelah 2001). Tiga *database* yang digunakan adalah Scopus, ScienceDirect, dan SpringerLink, dengan limitasi pencarian untuk artikel berbahasa Inggris yang diterbitkan pada periode pasca desentralisasi hingga saat ini (2001-2021).

Penelitian ini menetapkan istilah “*fiscal decentralization*” untuk kata kunci desentralisasi fiskal dan memasukkan kata kunci 'Indonesia' untuk mengkhususkan analisis kasus Indonesia. Untuk indikator pembangunan, kajian ini mengacu pada kata kunci ‘*regional development*’ untuk kata kunci pembangunan regional atau daerah. Padanan kata kunci juga dilakukan, seperti ‘*fiscal*’ atau ‘*budget*’ untuk kata kunci fiskal; ‘*decentralisation*’ atau ‘*decentralization*’ atau ‘*deconcentration*’ atau ‘*delegation*’ atau ‘*devolution*’ untuk kata kunci desentralisasi; ‘*impact*’ atau ‘*influence*’ atau ‘*affect*’ atau ‘*consequence*’ untuk kata kunci implikasi; ‘*regional*’ atau ‘*geographical*’ atau ‘*zonal*’ atau ‘*territorial*’ atau ‘*spatial*’ untuk kata kunci regional; ‘*development*’ atau ‘*evolution*’ atau ‘*growth*’ atau ‘*maturing*’ atau ‘*expansion*’ atau ‘*enlargement*’ atau ‘*spread*’ atau ‘*progress*’ untuk kata kunci perkembangan. Operator *Boolean* digunakan untuk mencari literatur agar lebih presisi.

Artikel memenuhi syarat untuk proses revidi jika memenuhi beberapa prasyarat yang ditentukan (Tabel 1). Dalam penelitian ini kriteria inklusi mengacu pada kasus Indonesia, pendekatan kuantitatif yang digunakan penulis untuk menyimpulkan dampak desentralisasi terhadap pembangunan daerah, dan penggunaan data panel. Sedangkan kriteria eksklusi mengacu pa-

-da duplikasi, studi-studi selain yang berbahasa Inggris, studi kasus multi-negara atau lingkup regional seperti Asia Tenggara, Asia, dan negara-negara berkembang. Limitasi studi berbahasa Inggris bertujuan sebagai pengendalian kualitas dari artikel yang dikaji. Selain itu, kebanyakan studi berbahasa Indonesia tidak terekap dalam *database* dalam studi ini. Oleh karena itu, pada proses pemilihan artikel tidak ditemukan studi berbahasa Indonesia.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Studi: Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Definisi, Penjelasan, dan Contoh
<i>Inklusi</i>	
Jenis Desentralisasi	Desentralisasi fiskal yang didefinisikan sebagai pengalihan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan untuk pengeluaran dan pendapatan pemerintah dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Alm et al., 2001; Schneider, 2003; Smoker, 2001)
Jenis/Bentuk Literatur	Literatur merupakan artikel <i>peer-reviewed</i> dan <i>research article</i> (bukan <i>commentaries</i> , resensi buku, <i>thesis</i> , disertasi atau esai analisis).
Rentang waktu	Artikel yang dipublikasikan pada tahun 2001-2021.
Bidang Implikasi	Setidaknya membahas satu di antara bidang berikut: pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan sosial (seperti pembangunan infrastruktur dan akses pelayanan sosial).

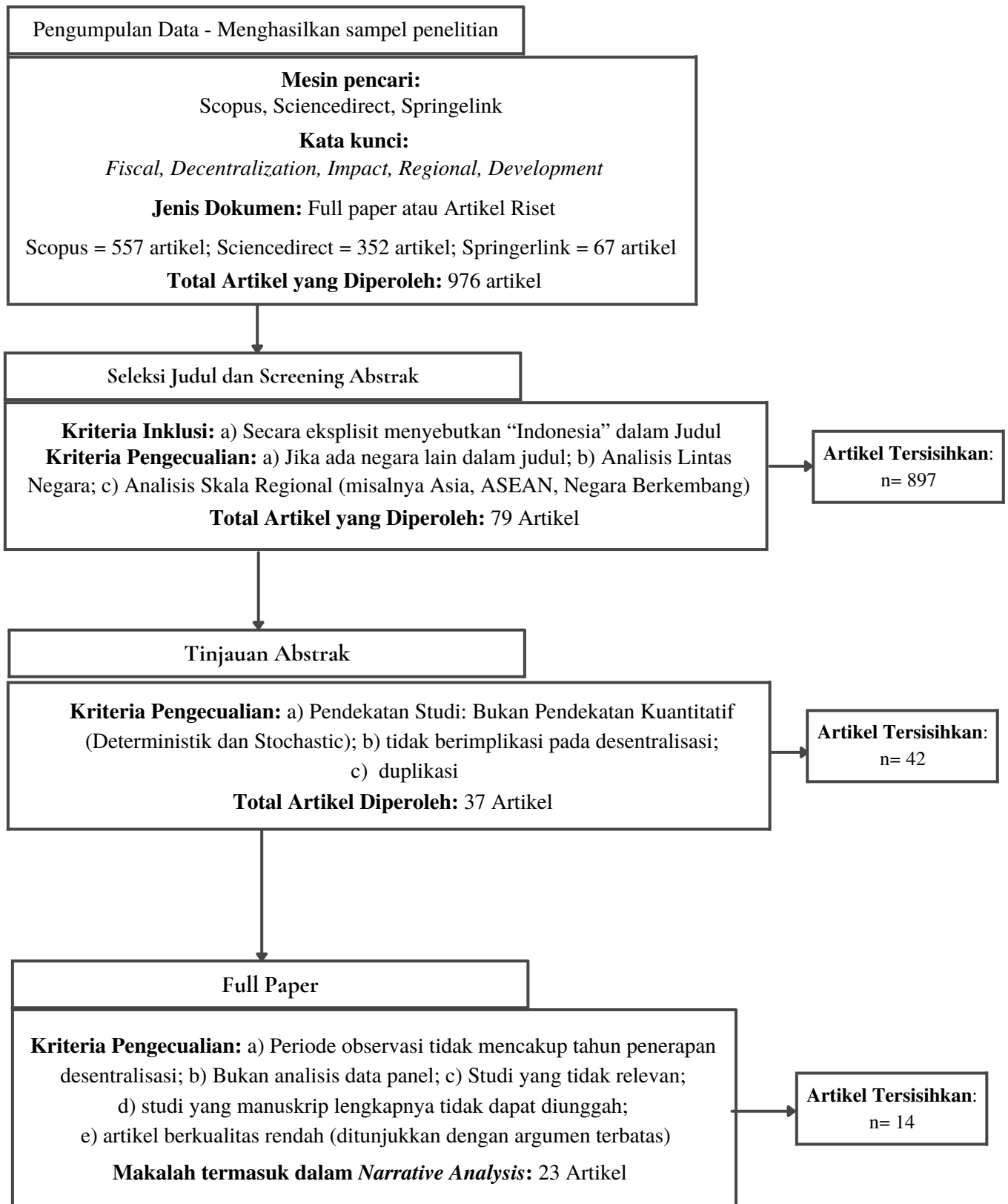
Indikator yang terkuantifikasi	Setiap bidang harus memiliki indikator yang terukur, seperti pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial; tingkat partisipasi pendidikan; tingkat kemiskinan; tingkat ketimpangan pendapatan.
Lokasi Studi	Studi kasus Indonesia secara umum atau dapat berupa analisis per wilayah seperti provinsi atau kabupaten/kota.
<i>Eksklusi</i>	
Studi kasus multi-negara	Studi kasus Indonesia dan negara-negara lain tidak termasuk, seperti Asia Tenggara, negara-negara berkembang, negara-negara G-20, negara-negara <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN), perbandingan negara Indonesia dan suatu negara, dan lain-lain.
Studi berbahasa non-Inggris	Studi-studi yang dipublikasi dalam Bahasa Spanyol, Perancis, Belanda, dan lain-lain.

Bidang pendidikan merujuk pada indikator-indikator seperti tingkat pendaftaran sekolah dasar, menengah, hingga atas, pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, serta indikator indeks pembangunan sumber daya manusia seperti *Human Capital Index* (HDI). Indikator kesehatan meliputi variabel-variabel seperti tingkat partisipasi asuransi kesehatan, alokasi dana untuk bidang kesehatan, dan lain-lain. Indikator ekonomi pada studi ini meliputi indikator-indikator seperti kemiskinan, pendapatan, dan produk domestik regional bruto. Indikator pelayanan sosial meliputi variabel-variabel infrastruktur, dan akses pelayanan sosial.

4. HASIL

Gambar 1 menampilkan diagram proses identifikasi dan rangkuman artikel untuk proses kajian di studi ini. Pada tahap pengumpulan data, terdapat 976 artikel dan abstrak yang didapatkan melalui tiga database. Tahapan kedua dilakukan melalui proses seleksi judul hingga terjaring 79 artikel atau sebanyak 897 artikel dikeluarkan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria-kriteria eksklusi tersebut diantaranya adalah studi kasus multi-negara seperti Asia Tenggara, Asia, atau negara-negara berkembang. Pada tahapan kajian abstrak, terdapat 43 artikel yang dikeluarkan dalam analisis karena tidak memenuhi kriteria penelitian kuantitatif dan berimplikasi pada desentralisasi. Pada seleksi *full paper*, sebanyak 14 artikel dikecualikan dalam analisis karena tidak memenuhi kriteria-kriteria seperti: argumen desentralisasi yang terbatas, tidak mencakup tujuan implikasi desentralisasi pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau pelayanan sosial.

Pada tahapan akhir, 23 artikel telah dikaji dan diklasifikasikan berdasarkan bidangnya. Tabel 2 melaporkan klasifikasi tersebut. Pada kasus sebuah studi yang menemukan lebih dari 1 bidang (multi-bidang), jumlah artikel dihitung sesuai jumlah bidang yang dibahas (N=28). Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar artikel membahas implikasi desentralisasi fiskal terhadap bidang ekonomi (N=13), sedangkan beberapa artikel membahas bidang pendidikan (N=5), bidang kesehatan (N=4), dan pelayanan sosial (N=6).



Gambar 1. Alur Kajian Sistematis

Tabel 2. Klasifikasi Studi-Studi

Bidang Studi	N
Pendidikan	5
Kesehatan	4
Ekonomi	13
Pelayanan Sosial	16
Total	28

Catatan: N= jumlah seluruh artikel. Apabila sebuah artikel membahas lebih dari satu bidang, maka dihitung sesuai jumlah bidang yang dibahas. Terdapat 4 artikel yang membahas multi-bidang: 3 artikel membahas 2 bidang ($n_2=6$), 1 artikel membahas 3 bidang ($n_3=3$), dan 18 artikel membahas 1 bidang ($n_1=18$), sehingga $N=n_1+n_2+n_3=19+6+3=28$.

4.1 Dampak Desentralisasi Terhadap Pendidikan

Secara umum, studi ini menemukan temuan yang relatif sama pada dampak desentralisasi terhadap variabel pendidikan. Tabel 3 melaporkan rangkuman hasil kajian sistematis (*systematic review*) dari dampak desentralisasi terhadap variabel-variabel pendidikan seperti tingkat pendaftaran sekolah dan pengeluaran pemerintah terhadap bidang pendidikan.

Tiga dari lima studi menyimpulkan bahwa implementasi desentralisasi tidak berdampak bagi pembangunan daerah di bidang pendidikan. World Bank (2005) dalam Cahyaningsih & Fitradhy (2019) beranggapan bahwa desentralisasi fiskal harus disertai dengan sumber daya manusia dan kapasitas manajerial yang kompeten. Adanya kesenjangan kualitas pendidikan di beberapa wilayah, khususnya wilayah Indonesia Timur, justru menyebabkan sedikitnya sumber daya manusia yang berkualitas, seperti tingkat produktivitas yang tinggi. Dampaknya, ketidaksiapan implementasi desentralisasi semakin memperburuk kondisi pembangunan di bidang ini.

Selain itu, desentralisasi fiskal juga berpotensi meningkatkan keputusan pemekaran wilayah (*government proliferation*) karena adanya otonomi daerah dalam mengembangkan wilayah administrasinya. Namun, adanya pemekaran-

ini justru juga dapat membuat wilayah pemekaran berada pada kondisi *diseconomies of scale* dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah pada bidang pendidikan (Fitrani et al., 2005). Oleh karena itu, kebijakan wilayah pemekaran seharusnya dapat diorientasikan pada kebijakan kolaborasi di antara pemerintah daerah atau pada peran yang lebih besar untuk provinsi.

Pada institusi pendidikan secara khusus, studi Leer (2016) berargumen bahwa ketidakefektifan desentralisasi pada bidang pendidikan disebabkan oleh kinerja pemerintah daerah yang cenderung lebih buruk daripada pemerintah pusat. Hasil ini akan menunjukkan bahwa otoritas pendidikan di tingkat kabupaten dan sekolah membuat keputusan manajemen sekolah yang buruk atau cenderung tidak mendukung perkembangan pendidikan. Pada akhirnya, Leer (2016) berargumen bahwa otonomi tidak identik dengan pengetahuan atau pemberdayaan. Implementasi desentralisasi yang efektif harus disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tahu bagaimana cara menilai kualitas sekolah dan memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya.

Tabel 3. Rangkuman Dampak Desentralisasi Terhadap Pendidikan

Penulis (Tahun)	Unit Analisis dan Tahun Observasi	Implementasi Desentralisasi	Variabel Desentralisasi	Temuan	Simpulan
Cahyaningsih & Fitriady (2019)	Provinsi, 1994- 2016	Membandingkan dampak kebijakan desentralisasi asimetris pada bidang pendidikan dengan membandingkan provinsi yang mendapatkan intervensi kebijakan dan yang tidak.	Variabel <i>dummy</i> sebagai identitas provinsi yang diuji, Provinsi Papua.	Kebijakan desentralisasi fiskal yang asimetris tidak efektif dalam meningkatkan indikator hasil pendidikan (<i>education outcome</i>) yakni partisipasi sekolah (<i>enrollment rate</i>). Setelah tahun 2003, ketimpangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya pada <i>education outcome</i> semakin tinggi meskipun desentralisasi telah diterapkan.	<i>Tidak Efektif</i>
Fitrani et al. (2005)	Kabupaten, 1998-2004	Menguji potensi pemekaran wilayah setelah penerapan desentralisasi yang disebabkan oleh tingkat pendidikan tertentu.	Variabel kontrol dengan memasukkan variabel rata-rata pengeluaran dan tingkat pendidikan di tahun 2001.	Tingkat pendidikan yang lebih tinggi (diukur dengan persentase penduduk dengan lulusan pendidikan menengah) meningkatkan kemungkinan pemekaran setelah desentralisasi. Namun, variabel pendidikan tidak signifikan dalam kasus pendidikan tinggi dan rata-rata lama sekolah	<i>Efektif Pada Golongan Tertentu</i>
Leer, (2016)	Sekolah, 1994; 1998; 2001; 2008	Mengukur pencapaian siswa di era pasca-desentralisasi dengan membandingkan sekolah negeri dan swasta.	Variabel <i>dummy</i> untuk periode pelaksanaan desentralisasi	Untuk prestasi matematika dan bahasa, pengaruh desentralisasi secara keseluruhan adalah negatif tetapi tidak signifikan secara statistik. Terdapat pengaruh negatif desentralisasi terhadap prestasi belajar matematika di sekolah-sekolah yang komite sekolahnya tidak aktif. Terdapat efek negatif pada jam yang dihabiskan di kelas. Kondisi ini mewakili sekitar dua jam lebih sedikit pengajaran per minggu yang dihabiskan di ruang kelas pada sekolah negeri.	<i>Tidak Efektif</i>

Lewis (2016)	Kabupaten, 2006-2010	Menguji dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap akses pendidikan	Variabel <i>dummy</i> tahun.	Belanja daerah secara positif memengaruhi akses ke pendidikan tetapi hanya sampai titik tertentu, setelah itu hubungannya menjadi negatif. Titik kritis dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah dan akses layanan pendidikan dicapai pada sekitar persentil ke-75 dari pengeluaran.	<i>Efektif Pada Titik Tertentu</i>
Lewis (2017)	Kabupaten, 2001-2010	Mengidentifikasi efek kausal pemekaran pada pendidikan Indonesia	Variabel <i>dummy</i> tahun.	Tingkat partisipasi sekolah tidak signifikan berbeda antara daerah pemekaran dan daerah lama. Kabupaten baru juga tidak memiliki kinerja yang jauh lebih buruk daripada kabupaten asli, setidaknya dalam hal akses pendidikan. Pembentukan pemerintah daerah baru tidak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara langsung atau saat pengaruh <i>lag</i> waktu diterapkan pada akses ke pendidikan jika dibandingkan dengan kabupaten asli.	<i>Tidak Efektif</i>

Catatan: ***Tidak Efektif*** merujuk pada temuan yang berimplikasi negatif signifikan secara statistik atau positif tidak signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal. ***Efektif*** merujuk pada temuan yang berimplikasi positif signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal.

4.2 Dampak Desentralisasi Terhadap Kesehatan

Tabel 4 melaporkan rangkuman studi dari dampak desentralisasi terhadap variabel-variabel kesehatan seperti fasilitas kesehatan, cakupan kunjungan neonatal pertama, fasilitas kesehatan dasar, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Secara umum, studi-studi ini menemukan temuan yang relatif sama pada dampak desentralisasi terhadap variabel kesehatan.

Tiga dari empat studi yang dikaji menyimpulkan bahwa desentralisasi efektif dengan persyaratan tertentu. Hal ini berarti implementasi desentralisasi berdampak signifikan apabila terdapat suatu kondisi yang mengiringinya, seperti periode tertentu, wilayah tertentu, dan titik pencapaian tertentu. Sementara itu studi lainnya menyimpulkan bahwa desentralisasi tidak efektif pada pembangunan di bidang kesehatan. Pengaruh desentralisasi terhadap *health outcomes* cenderung berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang karena terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan kebijakan di daerah tidak segera mengikuti pelaksanaan kebijakan desentralisasi (Apriliani & Khoirunurrofik, 2020). Selain itu, peran baru pemerintah daerah setelah desentralisasi membutuhkan keahlian yang berbeda untuk pembuatan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, sehingga pada beberapa daerah dengan kesiapan yang baik, implementasi desentralisasi dapat berjalan efektif.

Sebelum diterapkannya desentralisasi, beberapa daerah sangat mengandalkan transfer dari pusat sebagai pemasukan dalam pembangunan bidang kesehatan. Namun, berkurangnya ketergantungan terhadap transfer dari pusat tampaknya tidak mengarah pada belanja daerah yang lebih efisien dan/atau penyampaian layanan berkualitas lebih baik (Lewis, 2016). Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi pemerintahan daerah di Indonesia yang sangat lemah, secara umum, sehingga setiap pengeluaran dan pemberian layanan yang biasanya diharapkan dapat diperoleh sebagian besar warga negara sebagai fungsi dari desentralisasi pajak yang lebih besar serta akuntabilitas horizontal yang ditingkatkan dan/atau peningkatan persaingan antar yurisdiksi, justru dibanjiri oleh perolehan keuntungan tersebut oleh elit lokal (Lewis, 2016).

Tabel 4. Rangkuman Dampak Desentralisasi Terhadap Kesehatan

Penulis (Tahun)	Unit Analisis dan Tahun Observasi	Implementasi Desentralisasi	Variabel Desentralisasi	Temuan	Simpulan
Apriliani & Khoirunurrofik (2020)	Kabupaten/Kota, 2014-2017	Menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang kesehatan.	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) dan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	Dalam jangka pendek, DAK kesehatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. Namun DAK kesehatan berdampak positif dan signifikan terhadap cakupan PF di tahun kedua. Dampak pada cakupan KN1 tidak memungkinkan, bahkan dalam jangka waktu dua tahun.	<i>Efektif Pada Periode Tertentu</i>
Cahyaningsih & Fitriady (2019)	Provinsi, 1994-2016	Membandingkan dampak kebijakan desentralisasi asimetris pada bidang kesehatan dengan membandingkan provinsi yang mendapatkan intervensi kebijakan dan yang tidak.	Variabel <i>dummy</i> sebagai identitas provinsi yang diuji, Provinsi Papua.	Kebijakan desentralisasi fiskal yang asimetris tidak efektif dalam meningkatkan indikator hasil kesehatan (<i>health outcome</i>). Setelah tahun 2003, ketimpangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya pada <i>health outcome</i> semakin tinggi meskipun desentralisasi telah diterapkan.	<i>Tidak Efektif</i>
Hodge et al. (2015)	Individu, 1992, 1995, 1998, 2002-2003, 2007-2008.	Menguji hubungan antara layanan berbasis fasilitas dan desentralisasi serta interaksi desentralisasi dan lokasi geografis	Variabel <i>dummy</i> waktu dan geografis.	Probabilitas bahwa layanan berbasis fasilitas di Jawa dan Bali meningkat setelah desentralisasi, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien yang positif dan signifikan. Koefisien negatif dan signifikan pada variabel <i>dummy</i> yang mewakili kelompok pulau lain menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Jawa dan Bali, kemungkinan layanan yang diberikan di fasilitas kesehatan lebih rendah di wilayah-wilayah ini. Perbedaan regional yang kuat ini tetap ada bahkan setelah variabel kontrol ditambahkan. Koefisien estimasi yang sangat signifikan dan negatif secara statistik pada interaksi implementasi desentralisasi dan kelompok pulau	<i>Efektif Pada Wilayah Tertentu</i>

mengungkapkan bahwa disparitas dalam layanan berbasis fasilitas antara Jawa dan Bali dan semua kelompok pulau lainnya telah memburuk di era desentralisasi. Merujuk pada efek parsial rata-rata, disparitas pengiriman berbasis fasilitas antara Jawa dan Bali dan semua kelompok pulau lainnya telah memburuk setelah desentralisasi.

Lewis (2016)	Kabupaten, 2006-2010	Menguji dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap akses kesehatan	Variabel <i>dummy</i> tahun.	Belanja daerah secara positif memengaruhi akses ke layanan kesehatan tetapi hanya sampai titik tertentu, setelah itu hubungannya menjadi negatif. Titik kritis dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah dan akses layanan kesehatan dicapai pada sekitar persentil ke-75 dari pengeluaran. Peningkatan pengeluaran di beberapa titik dapat menyebabkan penurunan perbaikan terhadap akses layanan. Namun, kondisi ini tidak dapat menjelaskan bagaimana peningkatan pengeluaran dapat menyebabkan memburuknya akses layanan	<i>Efektif Pada Titik Tertentu</i>
--------------	----------------------	---	------------------------------	--	---

Catatan: ***Tidak Efektif*** merujuk pada temuan yang berimplikasi negatif signifikan secara statistik atau positif tidak signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal. ***Efektif*** merujuk pada temuan yang berimplikasi positif signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal.

4.3 Dampak Desentralisasi Terhadap Ekonomi

Tabel 5 melaporkan rangkuman studi dari dampak desentralisasi terhadap variabel-variabel ekonomi seperti kemiskinan, pendapatan daerah, dan pendapatan individu. Secara umum, studi ini menemukan temuan yang heterogen pada dampak desentralisasi terhadap variabel ekonomi.

Empat dari tiga-belas artikel menyimpulkan bahwa desentralisasi efektif dalam pembangunan ekonomi daerah, lima artikel menyimpulkan efektif bersyarat, dan empat artikel menyimpulkan tidak efektif. Desentralisasi dianggap efektif dalam pembangunan wilayah karena adanya kondisi ekonomi yang konvergen pasca-desentralisasi. Aritenang & Sonn (2018) menemukan bahwa pada periode setelah tahun 2001, kabupaten-kabupaten di Indonesia mengalami konvergensi dan pertumbuhan ekonomi sekitar 25.2%-32.4%. Namun, studi tersebut menemukan bahwa ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) sebagai implementasi perdagangan bebas hanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode pre-desentralisasi. Namun, studi konvergensi ini kemudian ditambahkan oleh studi Aginta et al. (2021) yang menemukan bahwa kelompok kabupaten yang mengalami konvergensi pendapatan tertinggi didominasi oleh kabupaten dengan karakteristik khusus seperti ibu kota besar atau daerah kaya sumber daya.

Sementara itu, Vidyattama (2013) juga menemukan bahwa konvergensi ekonomi hanya terjadi di beberapa wilayah saja pada waktu tertentu. Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita secara signifikan terjadi di Sumatera, sedangkan PDRB per kapita Jawa diperkirakan mengalami divergen. Pola ketimpangan PDRB per kapita di Jawa menunjukkan bahwa meskipun pemulihan kota-kota besar di Jawa setelah krisis keuangan Asia tahun 1997-98 berkontribusi pada peningkatan ketimpangan di pulau tersebut, Jakarta adalah sumber utama peningkatan ini, terutama selama tahun 2002 hingga 2008 .

Pada indikator ketimpangan ekonomi, Miranti et al. (2014) menemukan bahwa perubahan ketimpangan (antara 1,43% hingga 1,88%) mengimbangi dampak negatif pertumbuhan konsumsi terhadap perubahan kemiskinan (antara 5,69% hingga 5,71%). Meskipun pertumbuhan ekonomi berpihak pa-

-da kaum miskin selama desentralisasi, tingkat ketimpangan yang meningkat selama periode yang sama mengurangi dampak positif dari desentralisasi. Fakta bahwa peningkatan ketimpangan diimbangi pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin berimplikasi pada tuntutan kebijakan yang lebih spesifik untuk memerangi ketimpangan dan kemiskinan daripada hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai strategi pengentasan kemiskinan (Miranti et al., 2014).

Siburian (2020) menemukan bahwa meskipun desentralisasi fiskal mengurangi disparitas pendapatan daerah, tetapi disparitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap desentralisasi fiskal. Ketika desentralisasi fiskal meningkat 1 poin, disparitas daerah menurun 0,546 poin. Adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung telah memberikan insentif yang kuat bagi setiap kepala daerah untuk menggunakan keputusan belanja daerah yang signifikan agar dapat memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus untuk mencapai standar pembangunan ekonomi tertentu yang mengacu pada daerah yang lebih maju, dengan harapan dapat meyakinkan masyarakat agar memilih mereka lagi. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini saling bersaing untuk menyediakan barang publik secara lebih efisien dan meningkatkan taraf hidup di seluruh daerah.

Tabel 5. Rangkuman Dampak Desentralisasi Terhadap Ekonomi

Penulis (Tahun)	Unit Analisis dan Tahun Observasi	Implementasi Desentralisasi	Variabel Desentralisasi	Temuan	Simpulan
Aginta et al. (2021)	Kabupaten/kota, 2000-2017	Pengujian proses konvergensi ekonomi pada periode pasca desentralisasi	Periode pelaksanaan desentralisasi	Setelah periode desentralisasi, konvergensi tidak terjadi untuk semua kabupaten/kota, tetapi terjadi pada klub konvergensi yang menggambarkan evolusi disparitas pendapatan antar kabupaten di Indonesia. Kabupaten/kota pada kelompok 3 berkumpul dengan kecepatan tertinggi (5,3% per tahun). Kelompok berpendapatan tertinggi didominasi oleh kabupaten/kota dengan karakteristik khusus seperti ibu kota besar atau daerah kaya sumber daya, seperti Jakarta Pusat (pusat pemerintahan dan ibu kota negara), Kediri (penghasil tembakau nasional terbesar), Morowali (lokasi pengembangan kawasan industri berbasis nikel), Kabupaten Memberamo Raya, Mimika dan Teluk Bintuni (kabupaten kaya sumber daya alam) di wilayah pesisir pulau Papua.	<i>Efektif Pada Kelompok Tertentu</i>
Alisjahbana & Akita (2020)	Provinsi, 2005- 2013	Pengujian proses konvergensi ekonomi pada periode pasca desentralisasi	Membandingkan periode 4 tahun dan 8 tahun setelah desentralisasi	Untuk periode studi 2005-2013, ketimpangan antarprovinsi menunjukkan tren sedikit menurun; indeks <i>Population-Weighted Coefficient Variation</i> (WCV) kuadrat menurun dari 0,74 menjadi 0,67 dan koefisien awal log Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita signifikan secara statistik pada tingkat 5% dan memiliki tanda negatif, yang mengindikasikan proses konvergensi bersyarat antar provinsi daripada konvergensi absolut selama periode studi. Provinsi dengan PDRB per kapita awal yang lebih kecil cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan kabupaten dengan PDRB per kapita yang lebih besar setelah mengontrol perbedaan antara wilayah Jawa-Bali dengan wilayah lainnya.	<i>Efektif</i>

Arham & Hatu (2020)	Provinsi, 2015-2019	Menguji dampak transfer fiskal, khususnya Transfer Dana Desa, (sebagai kebijakan di era desentralisasi) terhadap ketimpangan pendapatan desa dan kemiskinan pedesaan.	Transfer fiskal dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus	Transfer dana desa tidak signifikan dalam mengatasi masalah ketimpangan antardesa. Hal ini juga terjadi meskipun dana perimbangan fiskal dimasukkan dalam analisis. Dengan kata lain, setiap penambahan dana transfer desa yang dapat berkontribusi pada distribusi sumber daya yang seimbang tidak mengubah hasilnya. Namun, peningkatan dana desa untuk setiap provinsi secara umum efektif untuk memperbaiki kemiskinan di pedesaan.	Tidak Efektif
Aritenang & Sonn (2018)	Perusahaan, 1993-2005	Meneliti dampak restrukturisasi negara, dalam hal ini desentralisasi, terhadap disparitas regional	Bagian pendapatan dan pengeluaran atas pertumbuhan ekonomi	Konvergensi secara signifikan terjadi pada kabupaten-kabupaten dalam pengujian, yang menunjukkan bahwa kabupaten yang lebih miskin tumbuh lebih cepat daripada kabupaten yang lebih maju. Desentralisasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (antara 25,2% -32,4%), dan pengaruh ini lebih kuat bagi daerah maju sehingga mengurangi kecepatan konvergensi. <i>Asian Free-Trade Agreement</i> (AFTA) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya pada masa pra-desentralisasi, yang menunjukkan pentingnya liberalisasi perdagangan pada periode tersebut.	Efektif Pada Beberapa Wilayah dan Kondisi
Aritenang (2019)	Kabupaten, 2002-2013	Transfer antar pemerintah atau <i>intergovernmental transfer</i> (IGT) dan pendapatan asli daerah atau <i>ownsource revenue</i> (OSR) dalam mempengaruhi belanja daerah untuk infrastruktur	Transfer antar pemerintah (IGT) dan pendapatan asli daerah (OSR)	OSR dan IGT berpengaruh positif terhadap belanja modal masing-masing (antara 30,6% -56,3%) dan 20,4%, yang menyiratkan pentingnya otonomi fiskal dalam pembangunan daerah di Indonesia. Secara rata-rata, pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) empat kali lebih besar dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini berarti tambahan satu Rupiah dari DAK per kapita akan menghasilkan peningkatan belanja modal sebesar Rp1,4 per kapita,	Efektif

sedangkan tambahan satu Rupiah dari DAU per kapita hanya akan menghasilkan peningkatan belanja modal sebesar Rp 0,23 per kapita.

Fitriani et al. (2005)	Kabupaten, 1998-2004	Menguji potensi pemekaran wilayah setelah penerapan desentralisasi.	Variabel kontrol dengan memasukkan variabel pengeluaran anggaran per kapita untuk gaji di tahun 2001.	Pengeluaran anggaran per kapita menunjukkan pengaruh secara positif dan signifikan dalam pasca desentralisasi, terhadap kemungkinan pemecahan wilayah, tetapi secara negatif dan signifikan pada periode pra desentralisasi.	<i>Efektif</i>
Iek & Blesia (2019)	Kabupaten, 2011-2015	Meneliti kesetaraan pembangunan pada pra-dan pasca-otonomi khusus di provinsi Papua dan Papua Barat	Menggunakan indeks Williamson untuk menguji teori Simon Kuznets.	Kesenjangan pembangunan daerah sebelum otonomi khusus relatif lebih kecil dibandingkan dengan kesenjangan pembangunan daerah setelah otonomi khusus. Kurva Kuznets tidak terbukti di era otonomi khusus, artinya pemberlakuan status otonomi menyebabkan terciptanya kesenjangan pembangunan yang lebih tinggi di provinsi-provinsi tersebut.	<i>Tidak Efektif</i>
Miranti et al. (2014)	Provinsi, 1984-2010	Menganalisis elastisitas pertumbuhan konsumsi dan elastisitas ketimpangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus khusus pada periode desentralisasi.	Periode pelaksanaan desentralisasi	Efektivitas pertumbuhan dalam penanggulangan kemiskinan di seluruh provinsi selama masa desentralisasi lebih besar daripada periode lain sejak 1984 Berkaitan dengan dampak penyeimbang dari ketidaksetaraan pada kemiskinan provinsi dari waktu ke waktu, terdapat peningkatan pengaruh ketimpangan pada kemiskinan provinsi dari waktu ke waktu, dengan titik tertinggi terjadi selama desentralisasi pada Elastisitas Ketimpangan Kemiskinan sebesar 1,13 (menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan sebesar 10% akan meningkatkan angka kemiskinan penduduk lebih dari 11%).	<i>Tidak Efektif</i>
Nursini & Tawakkal (2019)	Provinsi, 2010-2016	Mengukur pengaruh peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan kemiskinan, yaitu	Belanja pemerintah daerah, pendapatan pemerintah	Pendapatan pemerintah daerah dan transfer antar pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini berarti peningkatan pendapatan	<i>Efektif Pada Indikator Tertentu</i>

belanja pemerintah daerah, pendapatan pemerintah daerah, dan transfer antar pemerintah.

daerah, dan transfer antar pemerintah.

negara dan transfer antar pemerintah di setiap daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang dapat digunakan untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan secara efektif.

Studi ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi bagi hasil yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta transfer antar pemerintah melebihi suatu titik tertentu, maka semakin tidak efektifnya penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan tanda positif dan signifikan pada kuadrat variabel. pendapatan daerah dan transfer antar pemerintah kuadrat

Pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti peningkatan belanja pemerintah daerah tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Pada tahap awal proses desentralisasi fiskal, alokasi belanja pemerintah masih terkonsentrasi pada penyelenggaraan pemerintahan, tetapi pada tahap selanjutnya, peningkatan porsi belanja pemerintah akan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui redistribusi kebijakan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan tanda negatif dari kuadrat koefisien pengeluaran pemerintah daerah.

Prawoto & Cahyani (2020)	Provinsi, 2012-2018	Menguji dampak desentralisasi fiskal pada ketimpangan pendapatan	Tingkat desentralisasi fiskal	Nilai koefisien derajat desentralisasi fiskal adalah 0,001 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,02. Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Efektif</i>
Santos-Marquez et al. (2021)	Provinsi dan kabupaten, 2010-2017	Menguji kondisi konvergen pada kabupaten-kabupaten	Periode pelaksanaan desentralisasi	Kelompok-kelompok kabupaten di wilayah terkaya lebih tidak stabil dan peringkat pendapatannya	<i>Tidak Efektif</i>

miskin terhadap kabupaten yang lebih kaya setelah penerapan desentralisasi.

kurang stabil jika dibandingkan dengan provinsi termiskin.

Dari segi kebijakan, hasil menunjukkan bahwa kebijakan dan kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung program distribusi pendapatan masih belum efektif.

Terdapat efek spasial yang justru memperlambat proses konvergensi.

Siburian (2020)	Provinsi, 2001-2014	Meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia.	Pengeluaran pemerintah daerah	Desentralisasi fiskal mengurangi ketimpangan pendapatan daerah, tetapi ketimpangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap desentralisasi fiskal. Ketika desentralisasi fiskal meningkat 1 poin, disparitas daerah menurun 0,546 poin.	<i>Tidak Efektif</i>
Vidyattama (2013)	Kabupaten, 1998-2008	Menguji apakah kinerja ekonomi wilayah tetangga (<i>neighbourhood effect</i>) dapat menentukan kecepatan konvergensi wilayah.	Periode pelaksanaan desentralisasi	Pada periode 2005-2008, terjadi konvergensi yang signifikan di tingkat kabupaten, sebagian disebabkan oleh wilayah sekitarnya. Namun, tren konvergensi secara keseluruhan masih sangat lemah. Konvergensi PDRB per kapita di wilayah Sumatera secara signifikan terjadi, sedangkan PDRB per kapita di wilayah Jawa ditemukan mengalami divergen. Sebaliknya, konvergensi regional dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kuat di kedua wilayah tersebut, meskipun kecepatan konvergensi meningkat di Jawa dan menurun di Sumatera. Pola konvergensi IPM kurang didominasi oleh pembangunan kota-kota di Jakarta. Meskipun angka IPM untuk kota-kota di Jakarta sedikit meningkat dibandingkan kabupaten di provinsi lain, peningkatan kabupaten kurang berkembang di Jawa dan Sumatera telah memainkan peran yang lebih besar dalam konvergensi. Namun, proses penyusulan (<i>catch-up</i>) tampaknya telah melambat selama 2005 hingga 2008.	<i>Efektif Pada Wilayah Tertentu</i>

Catatan: *Tidak Efektif* merujuk pada temuan yang berimplikasi negatif signifikan secara statistik atau positif tidak signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal. *Efektif* merujuk pada temuan yang berimplikasi positif signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal.

4.4 Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Sosial

Tabel 6 melaporkan rangkuman studi dari dampak desentralisasi terhadap variabel-variabel pelayanan sosial seperti pembangunan infrastruktur dan akses pelayanan sosial. Secara umum, studi ini menemukan temuan yang cukup heterogen pada dampak desentralisasi terhadap variabel pelayanan sosial. Berdasarkan enam studi yang dikaji, satu studi menyimpulkan bahwa desentralisasi efektif dalam pembangunan regional di aspek pelayanan sosial.

Studi Kis-Katos & Sjahrir (2017) menemukan bahwa desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan daya tanggap investasi publik terhadap cakupan infrastruktur publik, yang berpotensi berkontribusi pada konvergensi dalam penyelenggaraan layanan publik di seluruh kabupaten. Namun, Kis-Katos & Sjahrir (2017) menekankan prinsip kehati-hatian yang perlu diterapkan dalam melembagakan elemen desentralisasi tanpa pertimbangan sarana fiskal yang sesuai. Lewis (2017) memberikan contoh argumen ini salah satunya adalah dalam upaya pengurangan korupsi di daerah pasca-desentralisasi. Akuntabilitas pemilihan langsung dan kinerja keuangan publik yang kuat di antara kabupaten-kabupaten dapat menjadi indikasi berkurangnya korupsi di daerah. Pemerintah daerah yang tidak terlalu korup membelanjakan sumber dayanya secara lebih efisien dan memberikan tingkat akses yang lebih tinggi ke layanan publik utama.

Desentralisasi juga dianggap tidak efektif bagi pembangunan infrastruktur daerah, khususnya apabila suatu daerah adalah hasil pemekaran. Hal ini disebabkan oleh fungsi lingkungan tata kelola umum baik di sektor infrastruktur maupun di antara kabupaten baru yang relatif dapat menerima praktik korupsi (Lewis, 2017). Sifat sektor infrastruktur yang korup dan meningkatnya penangkapan elit di kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk dapat mengakibatkan akses yang lebih rendah ke layanan infrastruktur bagi sebagian besar warga di tempat-tempat tersebut. Pada kondisi ini perubahan kelembagaan perlu mencakup peraturan secara keseluruhan untuk menghasilkan efek yang diinginkan dan agar akuntabilitas yang baik dapat dicapai di tingkat daerah (Sjahrir et al., 2014).

Tabel 6. Rangkuman Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Sosial

Penulis (Tahun)	Unit Analisis dan Tahun Observasi	Implementasi Desentralisasi	Variabel Desentralisasi	Temuan	Simpulan
Kis-Katos & Sjahrir (2017)	Kabupaten, 1994-2009	Mengukur dampak desentralisasi fiskal dan politik terhadap struktur pengeluaran dengan memperkirakan determinan belanja pembangunan daerah per kapita di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.	Pengeluaran daerah.	Peningkatan rata-rata pengeluaran investasi di kabupaten-kabupaten di Indonesia sebagian besar dapat dijelaskan oleh peningkatan pendapatan yang terkait dengan proses desentralisasi fiskal. Terdapat perubahan dalam responsivitas terhadap stok infrastruktur publik lokal setelah desentralisasi fiskal dan administratif, koefisien infrastruktur publik negatif ditemukan sepanjang periode waktu (berkisar antara -0,06 dan -0,07), yang tidak berubah secara signifikan setelah desentralisasi. Meskipun cakupan infrastruktur publik tidak terkait dengan investasi pada baseline, hubungannya menjadi lebih negatif setelah desentralisasi. Pasca desentralisasi, terjadi peningkatan elastisitas pendapatan dari pengeluaran investasi di bidang infrastruktur tidak berubah pada tingkat 0,89.	<i>Efektif</i>
Lewis (2016)	Kabupaten, 2006-2010	Menguji dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap pemberian pelayanan bidang infrastruktur	Variabel <i>dummy</i> tahun.	Belanja daerah secara positif memengaruhi akses ke pelayanan infrastruktur tetapi hanya sampai titik tertentu, setelah itu hubungannya menjadi negatif. Titik kritis dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah dan akses layanan infrastruktur dicapai pada sekitar persentil ke-75 dari pengeluaran.	<i>Efektif Pada Titik Tertentu</i>
Lewis (2017)	Kabupaten, 2001-2010	Mengidentifikasi efek kausal pemekaran pada infrastruktur Indonesia	Variabel <i>dummy</i> tahun.	Akses pelayanan air dan sanitasi tidak signifikan berbeda antara daerah pemekaran dan daerah lama. Kabupaten baru juga tidak memiliki kinerja yang jauh lebih buruk daripada kabupaten asli, setidaknya dalam hal akses infrastruktur. Namun, kabupaten	<i>Tidak Efektif</i>

baru memberikan akses yang lebih rendah ke layanan infrastruktur dibandingkan dengan pemerintah daerah asli.

Pembentukan kabupaten baru berdampak negatif terhadap akses infrastruktur dibandingkan dengan pemerintah daerah asal, setidaknya pada tahun kedua implementasi. Hasil spesifik menunjukkan bahwa pembentukan kabupaten baru menyebabkan penurunan sekitar 1% dalam akses rumah tangga ke air dan sanitasi pada tahun ke-2 dibandingkan dengan kabupaten asli.

Lewis et al (2020b)	Kabupaten, 2005-2017	Mengidentifikasi efek kausal pemekaran pada infrastruktur Indonesia	Pemberian layanan di daerah	Terdapat efek <i>incumbency</i> (efek dari kandidat politik periode sebelumnya yang kembali terpilih menjadi pimpinan di periode selanjutnya) yang sangat kuat untuk pemilihan walikota di Indonesia. Walikota periode kedua mengalokasikan lebih sedikit dana untuk anggaran (rutin dan) pendidikan dan kesehatan dan membelanjakan lebih banyak untuk (modal dan) infrastruktur daripada walikota periode pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka mengelola anggaran dengan kurang hati-hati (sebagaimana dinilai dari hasil audit eksternal), dan bahwa mereka memberikan layanan tidak lebih atau kurang efektif daripada mitra periode pertama mereka.	<i>Tidak Efektif</i>
Pal & Wahhaj (2017)	Kelompok komunitas, 1997-2007	Mengkaji dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap belanja publik lokal di seluruh komunitas yang dicirikan oleh berbagai jenis lembaga informal dan formal.	Pengeluaran daerah untuk infrastruktur	Desentralisasi fiskal telah menyebabkan penurunan investasi. Hal ini terjadi pada bagian dari total belanja publik di masyarakat yang memiliki tradisi demokrasi atau mematuhi ketat hukum adat. Masyarakat yang memiliki tradisi demokrasi dan berpegang pada hukum adat mengalami peningkatan investasi yang tajam yang lebih besar.	<i>Tidak Efektif</i>

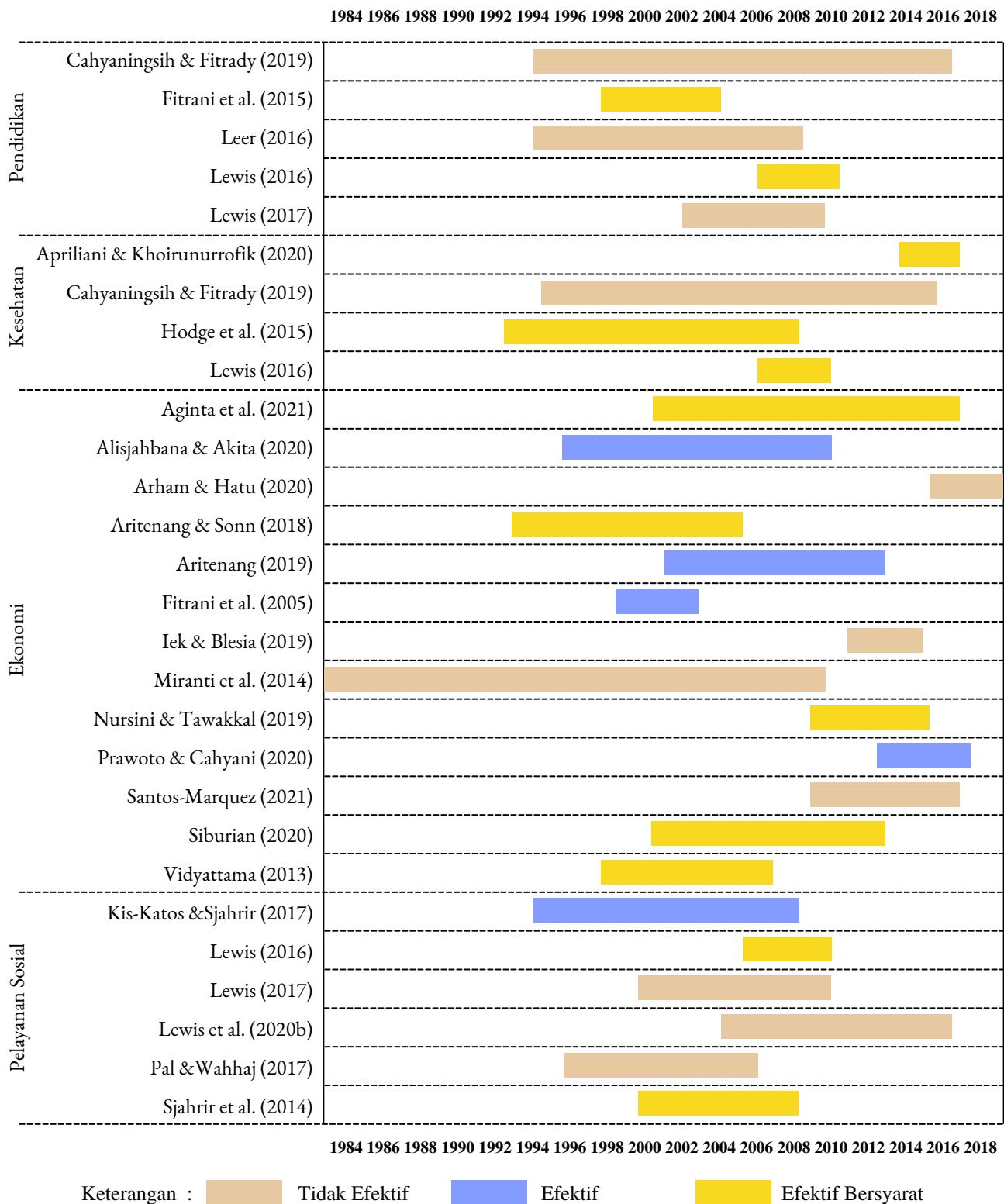
Desentralisasi menyebabkan pergeseran belanja publik ke arah investasi barang-barang sosial, dengan tidak ada perubahan dalam bagian yang realokasikan ke investasi dalam komunikasi dan infrastruktur jalan.

Sjahrir et al. (2014)	Kabupaten, 2001-2009	Menguji determinan pengeluaran administrasi yang berlebihan.	Periode setelah desentralisasi	Efek skala berperan penting dalam menjelaskan indikator pengeluaran administratif. Semua jenis pengeluaran administratif per kapita, kecuali lain-lain, menurun seiring dengan besarnya populasi. Wilayah kabupaten yang lebih luas meningkatkan biaya administrasi, tetapi hanya dalam hal investasi modal dan barang dan jasa. Untuk total pengeluaran administrasi, diperkirakan tidak mencapai angka yang signifikan.	<i>Efektif Pada Kondisi Tertentu</i>
--------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	---	---

Catatan: ***Tidak Efektif*** merujuk pada temuan yang berimplikasi negatif signifikan secara statistik atau positif tidak signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal. ***Efektif*** merujuk pada temuan yang berimplikasi positif signifikan secara statistik dengan adanya desentralisasi fiskal.

5. DISKUSI

Studi ini telah mengkaji secara sistematis 23 artikel dari berbagai bidang. Garis waktu dari kajian sistematis pada studi ini diilustrasikan di Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi Simpulan Studi

Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan 28 bidang yang dikaji dari 23 artikel, studi ini menemukan bahwa hanya lima artikel yang menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal efektif tanpa syarat (*unconditionally*) dalam pembangunan daerah. Hal ini berarti implementasi desentralisasi secara efektif berpengaruh terhadap pembangunan tanpa suatu kondisi yang perlu mengiringi. Dari lima artikel tersebut, empat artikel dibahas pada topik bidang ekonomi. Sementara itu, studi ini menemukan 12 artikel yang beragumen bahwa desentralisasi fiskal efektif pada beberapa kondisi, seperti geografis, periode waktu tertentu, dan tingkat pendapatan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi tidak secara umum berkontribusi pada pembangunan daerah. Sementara itu, 11 artikel beragumen bahwa desentralisasi tidak efektif dalam pembangunan daerah, baik tidak efektif secara signifikan atau justru menimbulkan efek negatif bagi kesejahteraan daerah, seperti peningkatan ketimpangan.

Berdasarkan klasifikasi bidang pada Gambar 2, terlihat bahwa hanya sektor pendidikan dan kesehatan yang tidak memiliki temuan efektif tanpa syarat. Temuan ini berimplikasi bahwa sektor pendidikan dan kesehatan mungkin seharusnya menjadi wewenang pusat, ketimbang daerah. Hal ini juga sebagai gambaran masih timpangnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan antar daerah. Adanya desentralisasi yang terkesan tanpa persiapan justru akan meningkatkan potensi ketimpangan yang semakin besar karena pertumbuhan daerah hanya akan bergantung pada inisiatif kebijakan daerah.

Temuan pada studi ini juga relevan pada studi kasus beberapa negara. Isu perimbangan menjadi perhatian utama apabila bidang kesehatan didesentralisasikan. Berdasarkan studi kasus oleh Cavalieri & Ferrante (2016) di Italia diketahui bahwa ketidakseimbangan fiskal vertikal dapat muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dan tanggung jawab pengeluaran bidang kesehatan di tingkat daerah. Perpindahan layanan kesehatan antar yurisdiksi memberikan alasan ekonomi lebih lanjut untuk hibah dari pusat ke daerah, sejauh pemerintah pusat mampu mengidentifikasi kebutuhan daerah dan menargetkan hibah secara optimal.

Penerapan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan salah satu contoh yang relevan dengan argumen Cavalieri & Ferrante (2016). Studi dari Sparrow et al. (2017) secara spesifik meneliti tingkat heterogenitas dan efektivitas program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diterapkan menyusul diberlakukannya desentralisasi di Indonesia. Namun, Sparrow et al. (2017) menemukan bahwa efektivitas program ini sangat bergantung pada berbagai aspek, khususnya keberlanjutan politik, mekanisme penargetan, kontrak penyedia layanan kesehatan, struktur manajemen, serta paket layanan yang diberikan. Keberlanjutan politik sebagai salah satu penyebab ketidakpastian efektivitas Jamkesda semakin memperkuat dugaan bahwa desentralisasi fiskal di bidang kesehatan mungkin menjadi alat politik untuk menarik simpati masyarakat (Siburian, 2020).

Selain isu ekuitas (*equity*) dan keberlanjutan politik, desentralisasi di bidang kesehatan memerlukan adanya kesiapan masing-masing komponen sistem kesehatan, terutama di tingkat daerah. Komponen tersebut terdiri dari tata kelola kesehatan (*health governance*), pendanaan kesehatan (*health financing*), tenaga kesehatan (*health workforce*), logistik dan teknologi terkait kesehatan (*medicines, vaccines, and technology*), sistem informasi kesehatan (*health information system*), dan layanan kesehatan (*health service delivery*) itu sendiri (World Health Organization, 2010). Berbagai inisiatif di bidang kesehatan di tingkat daerah seperti Jamkesda mengindikasikan keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan desentralisasi di bidang kesehatan, tetapi sebagaimana disebutkan oleh Sparrow et al. (2017) bahwa efektivitas Jamkesda ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengingat pentingnya kesiapan sistem kesehatan, sebenarnya keberhasilan penerapan Jamkesda akan merefleksikan kualitas dari sistem kesehatan daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, Jamkesda yang merupakan terobosan untuk pendanaan kesehatan akan membutuhkan tata kelola kesehatan yang baik, logistik dan tenaga kesehatan yang cukup, serta dukungan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai.

Pada sektor pendidikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengalokasikan cukup banyak anggaran untuk sektor pendidikan. Sebagai salah satu implementasi Undang-

Undang Pemerintahan Daerah, anggaran tersebut akan disalurkan ke daerah secara langsung. Mengacu pada alur kebijakan ini, implementasi desentralisasi pada bidang pendidikan sebenarnya tidak dilakukan secara penuh karena kurangnya kemandirian daerah dalam pendidikan yang terlihat dari masih tingginya alokasi anggaran dari pusat untuk daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah untuk bidang pendidikan (Larasati & Saputra, 2014). Di satu sisi, alokasi dana yang besar dari pemerintah pusat dapat menjadi insentif daerah dalam meningkatkan pembangunan sektor pendidikan. Hal ini tentu dengan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat akuntabilitas yang setara satu sama lain. Pada kenyataannya, di sisi lain, akuntabilitas dan kapabilitas pemerintah daerah sangat heterogen. Alokasi dana pendidikan yang besar di satu daerah dengan sumber daya manusia yang baik mungkin akan terserap secara efisien dan menghasilkan output pendidikan yang berkualitas, tetapi pada daerah dengan kualitas dan fasilitas pendidikan yang terbatas, anggaran besar yang disalurkan lewat pemerintah daerah hanya akan meningkatkan tingkat inefisiensi realisasi anggaran yang tinggi. Pada kondisi ini, perlakuan berbeda daerah-daerah tertinggal seharusnya semakin diintensifkan oleh pemerintah.

Implementasi desentralisasi pada beberapa studi menunjukkan pengaruh positif terhadap berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDRB dan penerimaan modal asing (PMA) (Ganaie & Bhat, 2018; He & Sun, 2014; Pasichnyi et al., 2019). Temuan tersebut juga relevan dengan hasil kajian pada studi ini. Namun, perhatian utama seharusnya tidak hanya berfokus pada tingkat pertumbuhan ekonomi apabila analisis dilakukan pada negara Indonesia dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 279 juta penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, efektivitas desentralisasi seharusnya bukan hanya mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat, tetapi juga diimbangi dengan tingkat pemerataan dan tingkat inklusi yang baik. Dengan tingkat variasi kapabilitas dan akuntabilitas pemerintah daerah yang lebih tinggi di Indonesia dibandingkan negara-negara maju, desentralisasi fiskal berarti memberikan keleluasaan kepala daerah dalam menginisiasi berbagai program pembangunan untuk daerahnya. Dampaknya, kemajuan hanya akan terjadi pada daerah-

daerah dengan *good governance* yang baik. Argumen ini sejalan dengan studi Kyriacou et al. (2013, 2016) yang menemukan bahwa disparitas terjadi pada negara-negara berkembang setelah desentralisasi fiskal diterapkan, sedangkan ketimpangan ekonomi di negara-negara maju justru semakin berkurang dengan adanya kebijakan serupa sebagai konsekuensi dari perbedaan tingkat *good governance* antara kedua kelompok negara.

6. SIMPULAN

Pembahasan dalam studi ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi sudah berjalan selama dua dasawarsa, desentralisasi belum bisa berjalan dengan optimal. Daerah belum bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan juga potensi ekonomi daerah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab daerah sehingga meningkatkan ketergantungan pada transfer dan bantuan dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal telah menyebabkan peningkatan belanja birokrasi daerah, pajak berlebih, ekonomi biaya tinggi dan iklim bisnis yang tidak bersahabat, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan disparitas pendapatan. Desentralisasi fiskal juga belum memberikan manfaat yang optimal bagi sektor pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. Pada beberapa kasus, desentralisasi fiskal mendorong kesenjangan dalam layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.

Desentralisasi fiskal akan berjalan lebih efektif ketika Indonesia menjadi lebih maju. Hal ini sejalan dengan berbagai argumen tentang desentralisasi fiskal lebih tepat untuk negara yang lebih maju. Desentralisasi belum sesuai untuk Indonesia saat ini. Namun kita harus optimis. meskipun Indonesia menghadapi banyak masalah pada tahap awal desentralisasi, Indonesia akan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari desentralisasi saat bertumbuh menjadi ekonomi berpendapatan menengah, di mana secara teori, akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perbaikan tata kelola dan layanan publik di daerah.

Untuk meningkatkan manfaat dari desentralisasi fiskal, pemerintah pusat harus mendorong kebijakan daerah yang potensial untuk menciptakan desentralisasi yang efektif dan mendukung program redistribusi yang dipimpin oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus mendorong inovasi lokal dengan dukungan pemerintah pusat, baik dari sisi regulasi maupun insentif. Selain itu proses saling belajar antar-daerah perlu ditingkatkan di mana pemerintah pusat bisa berperan sebagai pemantik maupun fasilitator.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah tidak adanya estimasi kuantitatif rata-rata dampak penerapan desentralisasi terhadap suatu bidang. Hal ini disebabkan oleh tingkat heterogenitas antar-studi yang tinggi (satu artikel menggunakan suatu indikator, sedangkan sedangkan studi lain menggunakan indikator yang sangat berbeda, sehingga estimasi rata-rata akan meningkatkan kesalahan penyimpulan), sedangkan studi lain menggunakan indikator yang sangat berbeda, sehingga estimasi rata-rata akan meningkatkan kesalahan penyimpulan. Untuk mengatasi hal ini, studi-studi selanjutnya diharapkan dapat memperluas pencarian literatur melalui lebih banyak database untuk memperbesar peluang dalam mendapatkan literatur yang menggunakan indikator serupa agar dapat dilakukan estimasi kuantitatif.

REFERENSI

Aginta, H., Gunawan, A. B., & Mendez, C. (2021). Regional income disparities and convergence clubs in Indonesia: new district-level evidence. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 1–33. <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1868107>

Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: Evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52(1), 93–108. [https://doi.org/10.1016/S0094-1190\(02\)00018-9](https://doi.org/10.1016/S0094-1190(02)00018-9)

Alisjahbana, A., & Akita, T. (2020). Economic Tertiarization and Regional Income Inequality in a Decentralized Indonesia: A Bi-dimensional Inequality Decomposition Analysis. *Social Indicators Research*, 151(1), 51–80. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02374-z>

Alm, J., Aten, R. H., & Bahl, R. (2001). Can Indonesia Decentralize Successfully? Plans, Problems and Prospects. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 3(71), 83–102. <https://doi.org/10.1080/000749101300046537>

Apriliani, A. P., & Khoirunurrofik, K. (2020). The impact of special allocation fund (DAK) for health on achievements of health development performance in Indonesia. *Economies*, 8(3), 2020–2024. <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES8030072>

Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 433–442. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433>

Aritenang, A. F. (2019). The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25(3), 571–590. <https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1675352>

Aritenang, A., & Sonn, J. W. (2018). The effect of decentralization and free trade agreements on regional disparity in a developing economy: the case of Indonesia, 1993–2005. *International Journal of Urban Sciences*, 22(4), 546–564. <https://doi.org/10.1080/12265934.2018.1425155>

Bahl, R., & Johannes, L. (1994). Fiscal decentralization and intergovernmental transfers in less developed countries. *Publius*, 24(1), 1–20. <https://doi.org/10.2307/3330701>

Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185–205. <https://doi.org/10.1257/089533002320951037>

Brodjonegoro, B. (2004). The Effect of Decentralization on Business in Indonesia. In M. C. Basri and P. van der Eng (Ed.), *Business in Indonesia: New Challenges, Old Problem*. Institute of Southeast Asian Studies.

Cahyaningsih, A., & Fitradhy, A. (2019). The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 48–63. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3>

Cavalieri, M., & Ferrante, L. (2016). Social Science & Medicine Does fiscal decentralization improve health outcomes? Evidence from infant mortality in Italy. *Social Science & Medicine*, 164, 74–88. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.07.017>

Dwicaksono, A., & Fox, A. M. (2018). Policy points. *The Milbank Quarterly*, 96(2), 323–368.

Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79. <https://doi.org/10.1080/00074910500072690>

Ganaie, A. A., & Bhat, S. A. (2018). *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indian*. <https://doi.org/10.1177/2277978718760071>

He, Q., & Sun, M. (2014). Does fiscal decentralization promote the inflow of FDI in China? *Economic Modelling*, 43, 361–371. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.009>

Hodge, A., Firth, S., Jimenez-Soto, E., & Trisnantoro, L. (2015). Linkages between Decentralisation and Inequalities in Neonatal Health: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Studies*, 51(12), 1634–1652. <https://doi.org/10.1080/00220388.2015.1081172>

Iek, M., & Blesia, J. U. (2019). Development inequalities in autonomous regions: A study pre-and post- special autonomy in Indonesia's most eastern provinces. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(1), 303–314. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no1.303>

Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>

Kraemer, M. (1997). Intergovernmental transfers and political representation: empirical evidence from Argentina, Brazil and Mexico. In *Working Paper No 345*.

Kyriacou, A. P., Muinelo-gallo, L., & Roca-sagalés, O. (2013). *Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance* *. 94(1). <https://doi.org/10.1111/pirs.12061>

Kyriacou, A. P., Muinelo-gallo, L., & Roca-sagalés, O. (2016). *Regional inequalities , fiscal decentralization and government quality*. 3404(June). <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1150992>

Larasati, D., & Saputra, H. (2014). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan Di Indonesia Periode Sebelum Dan Setelah Desentralisasi Fiskal. *Jurnal BPPK*, 7, 91–110.

Leer, J. (2016). After the Big Bang: Estimating the effects of decentralization on educational outcomes in Indonesia through a difference-in-differences analysis. *International Journal of Educational Development*, 49, 80–90. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.02.005>

Lewis, B. D. (2016). Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695–1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>

Lewis, B. D. (2017). Does local government proliferation improve public service delivery? Evidence from Indonesia. *Journal of Urban Affairs*, 39(8), 1047–1065. <https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1323544>

Lewis, B. D., Nguyen, H. T. M., & Hendrawan, A. (2020). Political accountability and public service delivery in decentralized Indonesia: Incumbency advantage and the performance of second term mayors. *European Journal of Political Economy*, 64, 101910. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101910>

Mahi, B. R. (2016). Indonesia Decentralization: Evaluation, Recent Movement and Future Perspectives. *Evaluation, Recent Movement and Future Perspectives*, 31(1), 119–133.

Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, R. (2014). Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 461–482. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980377>

Nasution, A. (2017). The Government Decentralization Program in Indonesia. In *Central and Local Government Relations in Asia*. Edward Elgar Publishing.

Nursini, N., & Tawakkal. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(1), 270–285. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/16>

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Pal, S., & Wahhaj, Z. (2017). Fiscal decentralisation, local institutions and public good provision: evidence from Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 383–409. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.07.004>

Pasichnyi, M., Npytaliuk, A., Kaneva, T., Ruban, M., & Npytaliuk, A. (2019). *The impact of fiscal decentralization on economic development*. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.04](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04)

Pieterse, J. N. (2010). *Development Theory Deconstructions/Reconstructions” Second Edition*. Sage Publication Ltd.

Prawoto, N., & Cahyani, R. D. (2020). Analysis of unequal distribution of population income in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 489–495. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.489>

Prud’homme, R. (1995). The dangers of decentralization. *World Bank Research Observer*, 10(2), 201–220. <https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201>

Rodriguez-Pose, A. (2008). Decentralisation and Local and Regional Development. *CAF Documento de Trabajo*, 04, 1–40.

Rondinelli, D., McCullough, J., & Johson, R. (1989). Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework. *Development and Change*, 20, 57–87.

Santos-Marquez, F., Gunawan, A. B., & Mendez, C. (2021). Regional income disparities, distributional convergence, and spatial effects: evidence from Indonesian regions 2010–2017. *GeoJournal*, 7. <https://doi.org/10.1007/s10708-021-10377-7>

- Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. *Studies in Comparative International Development*, 38(3), 32–56.
- Sewell, D. O. (1996). “The dangers of decentralization” according to Prud’homme: Some further aspects. *World Bank Research Observer*, 11(1), 143–150. <https://doi.org/10.1093/wbro/11.1.143>
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal decentralization and regional income inequality: evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383–1386. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2014). Administrative Overspending in Indonesian Districts: The Role of Local Politics. *World Development*, 59(01), 166–183. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.008>
- Smoker, P. (2001). *Fiscal Decentralization in Developing Countries A Review of Current Concepts and Practice*.
- Sparrow, R., Budiyati, S., Yumna, A., Warda, N., Suryahadi, A., & Bedi, A. S. (2017). Sub-national health care financing reforms in Indonesia. *Health Policy and Planning*, 32(1), 91–101. <https://doi.org/10.1093/heapol/czw101>
- Tijaja, J., & Faisal, M. (2014). Industrial Policy in Indonesia: A Global Value Chain Perspective. *ADB Economics Working Paper*, 411.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Government Administration and Development: Making the State Work*. Palgrave Macmillan.
- Vidyattama, Y. (2013). Regional convergence and the role of the neighbourhood effect in decentralised Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(2), 193–211. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.809841>

World Health Organization. (2010). Monitoring the building blocks of health systems: *A handbook of indicators and their measurement strategies*. World Health Organization.
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf

Zhang, T., & Zou, H. fu. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics*, 67(2), 221–240.
[https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(97\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00057-1)